

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Abu Daud Busroh, *Asas-Asas Hukum Tata Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001.
- Ace Hasan Syadzily, *Desentralisasi, Otonomi, dan Pemekaran Daerah di Indonesia*, Edisi Pertama, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019.
- Alan Norton, *International Handbook of Local and Regional Government: A Comparative Analysis of Advance Democracies*, Great Britain: Reprinted, the Ipswich Book Company, Suffolk, 1997.
- Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
- _____, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Penerbit Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2001.
- _____, *Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945*, Uniska Press, Bandung, 1993.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Ctk. Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- BN. Marbun, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2007.
- Dede Mariana dan Caroline Paskarina, *Demokrasi dan Politik Desentralisasi*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2008.

Enny Purbaningsih, *Problematika Pembentukan Peraturan Daerah: Aktualisasi Wewenang dalam Era Otonomi Luas*, ctk. Pertama, PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2019.

Gabriele Ferrazi, *International Experiences in Territorial Reform-Implications For Indonesia*, USAID-DRSP, Jakarta, 2007.

Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Grasindo, Jakarta, 2007.

Hestu Cipto Handoyo dan Y. Thresianti, *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 1996.

Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.

_____, *Perihal Undang-Undang*, Ctk. Pertama, Konstitusi Press, Jakarta, 2006.

Josef Riwu Kaho, *Analisis Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Edisi Revisi, Ctk. Ketiga, Center for Politics and Government, Fisipol UGM, Yogyakarta, 2012.

_____, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Edisi 1, Ctk. Pertama, Rajawali Press, Jakarta, 1988.

Jürgen Georg Backhaus (editor), *Two Centuries of Local Autonomy*, In J. G. Backhaus, Ed Springer Science+Business Media, LLC, New York, 2012.

Johan Jasin, *Penegakan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Era Otonomi Daerah*, Deepublish, Yogyakarta, 2019.

- Khelda Ayunita dan Abd. Rais Asman, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2016.
- Mahfud Md, *Politik Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1998.
- Mudrajad Kuncoro, *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*, Erlangga, Jakarta, 2004.
- Muhammad Fauzan, *Hukum Pemerintahan Daerah : Kajian Tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah*, UII Press, Yogyakarta, 2006.
- Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung, 2009.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016.
- Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Sinar Harapan, Jakarta, 1999.
- Sirojul Munir, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia: Konsep, Azas, dan Aktualisasinya*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, ctk. Ketiga, Penerbit Universitas Indonesia (UIPress), Jakarta, 2020.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 1990.
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Konsep dan Metode*, Setara Press, Malang, 2020.
- Steven Mcshane, T. Travaglione, *Organisational Behaviour on the Pacific Rim*, 2nd Edition, North Ryde-NSW: McGraw-Hill Australia, Australia, 2007.
- Syamsuddin Haris, *Membangun Format Baru Otonomi Daerah*, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jakarta, 2006.

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta 2010.

Yusnani Hasyimzoem *Penguatan Institusional Pemekaran Daerah: Dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 ke Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*, Justice Publisher, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2014.

Jurnal

Jurnal Bina Praja, Edisi Vol. 7, No. 2, 2015.

Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi, Edisi Vol. 3, No. 2, 2020.

Jurnal Konstitusi, Edisi Vol. 14, No. 4, 2017.

_____, Edisi Vol. 9, No. 4, 2012.

_____, Edisi Vol. 10, No. 2, 2013.

Jurnal Law Reform, Edisi Vol. 15, No. 1, 2019.

Jurnal Legislasi Indonesia, Edisi Vol. 12, No. 2, 2015.

Jurnal Mimbar Hukum, Edisi Vol. 32, No. 2, 2020.

Jurnal Sains Global Indonesia, Edisi Vol. 3, No.1, 2021.

Jurnal Unisfat (E-Jurnal), Edisi Vol. 7, No. 2, 2012

Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences, Edisi Vol 2. No 74, 2018.

Tesis

Aulia Nurhikmah, "Analisis Argumentasi Secara Historis Filosofis Yuridis Dan Sosiologis Terhadap Usulan Perubahan Nama Daerah Provinsi Jawa

Barat”, diajukan sebagai tesis di Program Pascasarjana FH UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022.

Disertasi

Eddy Nurbaningsih, “Aktualisasi Pengaturan Wewenang Mengatur Urusan Daerah dalam Peraturan Daerah (Studi Priode Era Otonomi Seluas-luasnya)” diajukan sebagai disertasi di Program Pascasarjana Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 2011.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samsir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Toba Samsir dimekarkan menjadi Kabupaten Toba Samsir dan Kabupaten Samsir.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2017 tentang Perubahan Nama Kabupaten Mamuju Utara Menjadi Kabupaten Pasangkayu Di Provinsi Sulawesi Barat.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Nama Kabupaten Maluku Tenggara Barat Menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar Di Provinsi Maluku

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir Menjadi Kabupaten Toba Di Provinsi Sumatera Utara.

Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Lambang Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Mamuju Utara Menjadi Kabupaten Pasangkayu.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Nama Daerah, Pemberian Nama Ibu Kota, Perubahan Nama Daerah, Perubahan Nama Ibu Kota, dan Pemindahan Ibu Kota

Data Eletronik

Edwin, “MTB Menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar sesuai dengan PP Nomor 2 Tahun 2019”, dalam <https://infopublik.id/kategori/nusantara/325877/mtb-menjadi-kabupaten-kepulauan-tanimbar-sesuai-pp-nomor-2-tahun-2019>, Akses 31 Maret 2023.

Kadek Melda, “Kemendagri Jelaskan Nasib KTP Warga DKI Usai Anies Ganti 22 Nama Jalan”, dalam <https://news.detik.com/berita/d-6142262/kemendagri>

[jelaskan-nasib-ktp-warga-dki-usai-anies-ganti-22-nama-jalan](#), Akses 2 April 2023.

Liputan6.com, “Maluku Tenggara Barat Berubah Nama Jadi Kepulauan Tanimbar”, dalam, <https://www.liputan6.com/news/read/3885770/maluku-tenggara-barat-berubah-nama-jadi-kepulauan-tanimbar>, Akses 31 Maret 2023.

Reza Efendi, “Kabupaten Toba Samosir Berganti Nama Menjadi Toba”, dalam <https://www.liputan6.com/regional/read/4195978/kabupaten-toba-samosir-berganti-nama-menjadi-toba>, Akses 29 Maret 2023..

Simon Lolonlun, “Pemkab Kepulauan Tanimbar Percepat Regulasi Perubahan Nama”, dalam <https://ambon.antaranews.com/berita/51542/pemkab-kepulauan-tanimbar-percepat-regulasi-perubahan-nama>, Akses 31 Maret 2023.

